

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan Implementasi Kebijakan Puspaga AI Inayah di Kabupaten Tangerang sebagai berikut :

1. **Dilihat dari Aspek Tujuan dan Standar Kebijakan,** bahwa Implementasi Kebijakan Puspaga AI Inayah di Kabupaten Tangerang sudah berjalan dengan baik hal ini dibuktikan dengan informasi yang diperoleh dari informan bahwa para pelaksana kebijakan sudah melaksanakan kebijakan Puspaga sesuai Buku Pedoman Standar Kebijakan Puspaga yang diterbitkan Kementerian PP dan PA, sedangkan untuk sasaran kebijakan juga sudah tepat yaitu untuk orang tua atau wali atau keluarga yang mempunyai masalah dan membutuhkan bantuan pendampingan atau konsultasi untuk menyelesaikan masalah pengasuhan terhadap anak.
2. **Dilihat dari Sumber Daya**

**Sumber daya manusia (SDM)** sudah cukup memadai, Pengurus Puspaga AI Inayah Kabupaten Tangerang terdiri dari 12 pengurus dan mempunyai latar belakang Pendidikan sebagai guru, sehingga para pengurus dapat melakukan pendampingan atau memberikan nasihat bila ada keluarga yang mengalami masalah dengan kategori ringan seperti anak susah belajar, tidak fokus atau nilai pelajaran masih rendah, tetapi untuk kasus yang berat atau membutuhkan tenaga psikolog maka akan di sarankan untuk berkonsultasi dengan psikolog.

Di SDM masih ada kendala yang terjadi yaitu kurangnya tenaga psikolog yang datang setiap hari ke Puspaga AI Inayah untuk memberikan layanan konsultasi, kurangnya apresiasi kepada 12 pengurus Puspaga, tidak ada pembinaan terhadap pengurus Puspaga AI Inayah terutama dalam bimbingan teknis menangani kasus dan pengembangan Puspaga, tidak ada kaderisasi, tidak ada kerjasama dengan perguruan tinggi yang mempunyai program studi Psikolog.

**Sedangkan dari sumber daya anggaran** masih ada beberapa kendala diantaranya Puspaga Al Inayah membiayai semua biaya operasional kantor beserta gaji para pengurus serta membiayai kegiatan sosialisasi *parenting*, Dinas PP dan PA belum memberikan anggaran untuk mengadakan sosialisasi *parenting* serta untuk pengembangan Puspaga. Dinas PP dan PA belum merespon kebutuhan anggaran yang diperlukan Puspaga Al Inayah, Dinas PP dan PA baru memberikan tenaga Psikolog sesuai jadwal yang ditentukan .

3. **Dilihat Dari Aspek Komunikasi** terlihat ada beberapa kendala diantaranya komunikasi hanya selintas antara Dinas PP dan PA dengan Ketua Puspaga Al Inayah. Dinas PP dan PA belum merespon keluhan kesah kesulitan Puspaga serta pengembangan program Puspaga. Dinas PP dan PA Kabupaten Tangerang di tahun 2022 lebih banyak mengadakan sosialisasi ke kecamatan dan sekolah-sekolah untuk mengenalkan Puspaga karena masih banyak warga dan pelajar yang belum mengetahui tentang Puspaga. Komunikasi terhambat juga karena adanya pandemic COVID 19 sehingga membatasi pertemuan tatap muka dengan klien dan Puspaga binaannya, serta keterbatasan SDM dan seringnya mutasi pegawai di Dinas PP dan PA juga menjadi kendala komunikasi dengan Puspaga AL Inayah.
4. **Dilihat Dari Karakteristik Organisasi Pelaksana** dimana karakteristik organisasi pelaksana dalam implementasi kebijakan ini sudah terlaksana dengan baik, hal ini terbukti dengan adanya struktur organisasi adanya pola hubungan, birokrasi, dan norma yang terjadi pada birokrasi di mana mempengaruhi implementasi program, sehingga perlu adanya SOP agar tidak terjadi fragmentasi kelembagaan. Adanya peran dan tanggungjawab masing-masing pihak, dan adanya SOP, dengan adanya SOP maka pelayanan Puspaga akan sesuai standar dan mudah di kontrol oleh Lembaga yang berada di atasnya, masing-masing pihak sudah melaksanakan sesuai tugas dan tanggungjawabnya.
5. **Dilihat Dari Sikap Para Pelaksana** dalam melaksanakan kebijakan Puspaga dapat disimpulkan bahwa para pelaksana kebijakan sudah berjalan dengan baik hal ini terlihat bahwa para pelaksana memahami isi kebijakan, sasaran kebijakan dan melaksanakan kebijakan dengan baik dari segi tugas dan

tanggungjawabnya. Para pelaksana menerima dan melaksanakan serta mendukung kebijakan tersebut, para pelaksana menyadari manfaat bagi warga atau masyarakat yang mempunyai masalah dalam pengasuhan anak atau permasalahan dalam keluarga. Intensitas pelayanan dari Puspaga AI Inayah dengan membuka setiap hari layanan konsultasi bagi masyarakat yang membutuhkan layanan.

6. **Dilihat dari Aspek Lingkungan Sosial, Politik Dan Ekonomi** pada pelaksanaan kebijakan ini sudah berjalan dengan baik terbukti adanya dukungan dari masyarakat sekitar yang mendukung kebijakan ini. Masyarakat sekitar telah memanfaatkan pelayanan di Puspaga AI Inayah untuk melakukan konsultasi bila terjadi permasalahan pengasuhan di keluarga, dukungan juga datang dari Kecamatan Rajeg dan Kepolisian Sektor Rajeg. Kecamatan Rajeg sangat mendukung pelaksanaan Puspaga karena Puspaga termasuk indikator dalam penilaian Evaluasi Kota Layak Anak, yang mewajibkan setiap kecamatan harus mempunyai layanan konsultasi keluarga untuk masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Sedangkan Polres Rajeg sangat mendukung karena dengan adanya Kebijakan Puspaga diharapkan agar orang tua dapat mendidik anak dengan baik dengan penuh kasih sayang sehingga tidak terjadi tawuran pelajar, perkelahian antar pelajar, kasus kekerasan terhadap anak dan kasus *bullying* bisa menurun.

Sedangkan dari faktor politik, maka semua Operasional Perangkat Daerah (OPD) dalam hal ini Kecamatan Rajeg dan Polresta Rajeg sangat mendukung program ini.

Untuk faktor ekonomi dalam hal ini Kecamatan Rajeg sudah memberikan pelatihan untuk peningkatan UMKM, dan pembukaan bazar di lapangan Kecamatan Rajeg dapat diikuti oleh semua warga Rajeg dengan diberikannya pelatihan dan bazar diharapkan ada peningkatan pendapatan keluarga sehingga dengan pendapat itu keluarga dapat memenuhi hak-hak anak baik pendidikan ataupun gizi anak.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan penelitian diatas, maka peneliti memberikan beberapa saran atau strategi yang dapat dijadikan sebagai masukan dan

pertimbangan agar Implementasi Kebijakan Puspaga AI Inayah Kabupaten Tangerang dapat terlaksana lebih baik lagi.

**Adapun saran-saran (strategi) sebagai berikut**

1. **Berkaitan dengan Aspek Tujuan dan Standar Kebijakan** sudah terlaksana dengan baik, maka untuk aspek ini harus dipertahankan dan lebih ditingkatkan lagi.

2. **Berkaitan dengan Aspek Sumber daya**

**a. Sumber Daya Manusia**

Saran atau strategi untuk meningkatkan pelayanan di Puspaga khususnya dibidang sumber daya manusia, yaitu : meningkatkan motivasi kerja. mengikuti pelatihan penanganan kasus, meningkatkan kesejahteraan pengurus, adanya kaderisasi, adanya kerja sama dengan perguruan tinggi yang memiliki program studi psikolog. Dari beberapa saran atau strategi untuk meningkatkan kualitas pelayanan di Puspaga maka yang paling tepat saat ini untuk dilaksanakan adalah kerjasama dengan perguruan tinggi yang memiliki program studi psikolog, dengan adanya kerjasama ini maka kebutuhan tenaga psikolog bisa terpenuhi tanpa harus mengeluarkan biaya, mahasiswa yang membutuhkan tempat magang bisa praktik langsung menangani kasus yang membutuhkan pendampingan dari psikolog.

**b. Sumber Daya Anggaran**

Sedangkan masalah sumber daya anggaran maka ada beberapa saran atau strategi yang harus dilakukan untuk meningkatkan pelayanan di Puspaga AI Inayah yaitu : Dinas PP dan PA Kabupaten Tangerang memetakan kebutuhan Puspaga binaan terutama Puspaga AL Inayah, Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak mengalokasikan anggaran memberikan dana stimulan. Dana stimulan untuk mengapresiasi bagi Puspaga dengan biaya mandiri yang telah memberikan layanan bagi warga yang membutuhkan konsultasi. Dinas PP dan PA kabupaten Tangerang memakai dana alokasi khusus (DAK) untuk membiayai kebijakan Program PP dan PA dengan mengajukan proposal kebutuhan anggaran ke Biro Perencanaan Kementerian PP dan PA. Puspaga menjalin kerja sama dengan BKKBN, Dinas kesehatan atau dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama terkait

dengan sosialisasi pola pengasuhan anak yang benar di keluarga, mengundang pembicara yang kompeten untuk memberikan materi pengasuhan anak yang benar kepada warga sekitarnya dengan biaya gratis.

Di antara beberapa saran atau strategi tersebut strategi yang paling tepat dilakukan saat ini adalah Puspaga menjalin kerja sama dengan BKKBN, Dinas Kesehatan atau dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kementerian Agama terkait dengan memberikan sosialisasi pola pengasuhan anak yang benar di keluarga, mengundang pembicara yang kompeten untuk memberikan materi pengasuhan dengan biaya gratis, karena tidak ada biaya, dengan adanya kerja sama dengan instansi terkait maka instansi tersebut akan membantu memberikan nasrasumber sesuai bidangnya.

### **3. Berkaitan dengan Aspek Komunikasi**

Untuk mengatasi permasalahan komunikasi ada beberapa saran atau strategi yang harus dilakukan, strategi yang paling utama adalah melakukan komunikasi berkelanjutan atau dialog kinerja antara Dinas PP dan PA Kabupaten Tangerang dengan Puspaga Al Inayah untuk memantau program layanan konsultasi dan pengembangan Puspaga. Pendampingan sangat diperlukan agar program berjalan lebih lama dan mencapai sasaran, komunikasi tidak hanya sekilas tetapi harus terus menerus dilakukan agar para pelaksana konsisten untuk melaksanakan program. Dialog kinerja antara Puspaga Al Inayah dan Dinas PP dan PA perlu dibangun untuk mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan kebijakan Puspaga serta perbaikan-perbaikan yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan Puspaga. Di samping itu manfaat dialog kinerja juga untuk meningkatkan pemahaman tentang kebijakan Puspaga, dapat meningkatkan kinerja organisasi, meningkatkan kompetensi pengurus Puspaga, memotivasi pengurus, adanya solusi dan pemecahan masalah, meningkatkan hubungan kerja.

4. **Berkaitan dengan Aspek Karakteristik Organisasi Pelaksana** sudah terlaksana dengan baik maka harus dipertahankan dan lebih ditingkatkan lagi
5. **Berkaitan dengan Aspek Sikap Para Pelaksana** sudah terlaksana dengan baik maka harus dipertahankan dan lebih ditingkatkan lagi

6. **Dilihat dari Aspek Lingkungan Sosial, Politik Dan Ekonomi** sudah terlaksana dengan baik maka harus dipertahankan dan lebih ditingkatkan lagi.

**3. Rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan :**

- a. Menyampaikan hasil rekomendasi kepada Kepala Dinas PP dan PA Kabupaten Tangerang dan Ketua Puspaga Al Inayah Kabupaten Tangerang untuk bersama-sama menindaklanjuti hasil rekomendasi tersebut.
- b. Menyampaikan Hasil rekomendasi kepada Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak Atas Pengasuhan dan Lingkungan (Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak) untuk ditindak lanjuti agar dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merevisi Pedoman Standar Pelaksanaan Puspaga

## DAFTAR PUSTAKA

- Agus Dwiyanto. (2005). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Gadjah Mada University Press.
- Ahmad, AC, ST, M. (2020). *Manajemen Strategis by Dr. Ir. Ahmad, AC., ST., MM.* (z-lib.org).pdf (p. 223).
- Amirullah. (2015). *Manajemen Strategi*. Jakarta, Mitra Wacana Media.
- Bidang, D., & Hak, P. (2021). *Pedoman Standar Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)*.
- Dye, T. R. (2017). Understanding Public Policy. In *Understanding Public Policy*.
- Dye, T. R. (2018). *Analisis Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasi, Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Media Nusa Creative.
- Elvianita, A. M. dan D. (2018). *Pengantar Manajemen Strategik* (p. 328). Jayabagus Pres.
- Emzir. (2008). *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif dan Kualitatif*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Fischer, R. L. (2004). "Assessing Client Change in Individual and Family Counseling." *Research on Social Work Practice*, 14(2), 102–111. <https://doi.org/10.1177/1049731503257868>
- Grindel, M. (2017). *Politics and Policy Implementation in The Thrid World* (p. 310).
- Hunter, S. V. (2006). "Understanding the Complexity of Child Sexual Abuse: A Review of the Literature With Implications for Family Counseling." *The Family Journal*, 14(4), 349–358. <https://doi.org/10.1177/1066480706291092>
- Husniyah, A. (2019). "Parenting Bagi Orang Tua Muda di Pusat Pembelajaran Keluarga Surabaya Perspektif Abdullah Nashih `Ulwan." *Al-Hukama'*, 9(1), 172–194. <https://doi.org/10.15642/alhukama.2019.9.1.172-194>
- John A. Pearce dan Richard B Robinson. (1997). *Manajemen Strategik Formulasi, Implementasi dan Pengendalian* (p. 517). Binarupa Aksara.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on The Rights of The Child(CRC) atau Konvensi tentang Hak-hak Anak (KHA)*. (n.d.).
- Mccurdy, K. G., & Murray, K. C. (2003). "Confidentiality Issues when Minor Children Disclose Family Secrets in Family Counseling." *The Family Journal: Counseling and Therapy for Couples and Families*, 11(4), 393–398. <https://doi.org/10.1177/1066480703255468>
- Mulyadi, et. al. (2016). *Administrasi Publik Untuk Pelayanan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Mulyawan, R. (2016). *Birokrasi dan Pelayanan Publik*. Bandung : UNPAD PRESS.

- Nelson, J. A. (2006). "For Parents Only: A Strategic Family Therapy Approach in School Counseling." *The Family Journal*, 14(2), 180–183. <https://doi.org/10.1177/1066480705285557>
- Noor, N. M. (2014). "Family counseling in Malaysia: Current issues and practices." *International Education Studies*, 7(13), 33–39. <https://doi.org/10.5539/ies.v7n13p33>
- Nugroho, R. (2020). *Public Policy Dinamika Kebijakan Publik, Analisis Kebijakan Publik, Manajemen Politik Kebijakan Oublik, Etika Kebijakan Publik, Kimia Kebijakan Publik*. (p. 898). Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Okech, J., & Kimemia, M. (2012). "Professional Counseling in Kenya: History, Current Status, and Future Trends." *Journal of Counseling and Development*, 90(1), 107–112. <https://doi.org/10.1111/j.1556-6676.2012.00015.x>
- Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Terhadap Tindak Kekerasan*. (n.d.).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Publik*. (n.d.).
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024*. (n.d.).
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak*. (n.d.).
- Pradana, H. A. K., & Wahab, A. (2018). "Implementasi Andragogi Sekolah Pra Nikah Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian di Kota Surabaya." *Studi Hukum*, 7(2), 23–38.
- Rachman, R. F. (2019). "Implementasi Kebijakan Pusat Konseling Anak Dan Remaja Di Surabaya." *Al-Tazkiah: Jurnal Bimbingan Dan ...*, 8(2), 77–91. <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/altazkiah/article/view/1217>
- Silalahi, U., & Syafri, W. (2015). *Desentralisasi Dan Demokrasi Pelayanan Publik Menuju Pelayanan Pemerintah Daerah Lebih Transparan, Partisipatif, Responsif dan Akuntabel*. Bandung: IPDN PRESS.
- Sinambela, D. (2014). *Reformasi Pelayanan Publik Teori, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Surat Edaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 57 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Layanan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Di Daerah*. (n.d.).
- Surat Keputusan Keputusan Kepala Dinas PP dan PA Kabupaten Tangerang Tentang Pembentukan Tim Puspaga Al-Inayah Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang Nomor 800/Kep-27/2019*. (n.d.).
- Susilowati, M. A. (2019). "Model Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanganan

- Remaja Beresiko di RW 09 Kebon Pisang Kota Bandung.” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Dan Pelayanan Pekerja Sosial*, 1(2).
- Tacjan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. AIPI Bandung.
- Undang-undang Dasar 1945*. (n.d.).
- Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak,.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian*. (n.d.).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah*. (n.d.).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*. (n.d.).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*. (n.d.).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga*. (n.d.).
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework. *Administration & Society*, 6(4), 445–488. <https://doi.org/10.1177/009539977500600404>
- Wahab, S. A. (2017). *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Widodo, J. (2006). *Analisis Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Media Nusa Creative.
- Winarno, B. (2012). *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. In Yogyakarta : CAPS.
- Yusuf, M. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Penelitian Gabungan* (p. 480). Jakarta : PT. Fajar Interpratama Mandiri.

# LAMPIRAN-LAMPIRAN

## Pedoman Wawancara

### Lampiran 1 : Pedoman Wawancara

#### PEDOMAN WAWANCARA

Nama Informan :  
Jenis Kelamin :  
Umur :  
Jabatan :  
Alamat :

#### A. Tujuan dan Sasaran dan standar kebijakan PUSPAGA

1. Apakah tujuan puspaga ?
2. Apakah sasaran puspaga ?
3. Bagaimana standar kebijakan puspaga ?
4. Apa sudah melakukan Pendampingan terhadap pelaksanaan puspaga di daerah ?

#### B. Sumber daya puspaga

1. Berapa Jumlah Sumber Daya manusia yang dibutuhkan di Puspaga (ada berapa orang) ?
2. Bagaimana Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan (kebutuhan ruangan dan peralatannya) ?
3. Apakah sarana dan prasarana sudah di penuhi ?
4. Bagaimana dengan sumber daya anggaran yang dibutuhkan puspaga (jumlah anggaran) ?
5. Bagaimana ketersediaan staf dalam menjalankan kebijakan puspaga ?
6. Apakah SDM berkompeten terhadap tugas yang dijalankan ?
7. Apakah SDM mempunyai ketrampilan dan keahlian dan mengerti apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya ?

#### C. Komunikasi antar organisasi mengenai aktivitas dan aktifitas implementasi

1. Apakah standar, sasaran dan tujuan dan kebijakan puspaga sudah dikomunikasikan kepada para pelaksana ?
2. Apakah komunikasi tersebut ada kejelasan, konsisten dan seragam dari sumber informasi ?
3. Bagaimana komunikasi antar organisasi ?
4. Ada kejelasan peran dan tugas masing-masing organisasi ?
5. Apakah komunikasi tersebut mengalami gangguan atau distortion baik yang disengaja atau tidak disengaja ?
6. Bagaimana aktifitas implementasinya ?
7. Apakah ada koordinasi dengan pihak-pihak terkait, (sebutkan peran dan tanggungjawabnya) ?

**D. Karakteristik Organisasi Pelaksana (struktur birokrasi)**

1. Apa dasar hukum untuk melaksanakan kebijakan PUSPAGA ?
2. Apa ada SOP terhadap pelaksanaan puspaga tersebut ?
3. Apakah sop tersebut berjalan ?
4. Apakah ada pemantuan terhadap sop tersebut ?
5. Apakah organisasi Punya kepentingan terhadap program ini ?

**E. Sikap Para Pelaksana**

1. Badan atau unit yang disiapkan untuk melaksanakan kebijakan puspaga ?
2. Apakah repon sikap para pelaksana menerima atau menolak kebijakan tersebut , kalau menerima apa yang dilakukannya ?
3. Apakah para pelaksana tersebut mempunyai pemahaman dan pandangan yang sama terhadap kebijakan tersebut. ?
4. Bagaimana para pelaksana melaksanakan secara intensitas kebijakan tersebut ?

**F. Lingkungan Sosial, politik ekonomi**

1. Apakah lingkungan sosialias ekonomi dan politik mendukung kebijakan tersebut ?
2. Kalau mendukung contoh kegiatannya seperti apa ?
3. Apakah sudah membangun jejaring dengan stake holder yang lain ?

**G. Pertanyaan Tambahan Implementasi PUSPAGA**

1. Menurut Bapak/ibu strategi apa yang diambil agar kebijakan berjalan dengan baik
2. Apakah ada hambatan dalam pelaksanaan puspaga
3. Untuk mengatasi permasalahan itu apa
4. Apa harapan terhadap kebihanan
5. Bagaimana kebermanfaatn kebijakan secara berkelanjutan
6. Dampaknya Puspaga bagi masyarakat

## **Pedoman Observasi Pengamatan**

Berisi petunjuk melaksanakan observasi

1. Tujuan observasi
2. Menentukan jadwal observasi
3. Membuat daftar item yang akan di observasi
4. Observasi partisipan (Peneliti terlibat dalam situasi yang diamati)
5. Melakukan pengamatan dan pencatatan terhadap sarana dan prasarana kantor Pelayanan Puspaga Al Inayah
6. Tetap menjaga obyektivitas dalam proses observasi
7. Analisis data hasil observasi
8. Menyajikan laporan hasil observasi mengenai sarana dan prasarana ke dalam tesis
9. Alat perekam wawancara
10. Kamera untuk mendokumentasikan objek penelitian dan informan kunci
11. Catatan lapangan (hasil wawancara/observasi)
12. Gambar lokasi penelitian
13. Data sekunder adalah data atau dokumen serta laporan pelaksanaan kegiatan Puspaga di Kabupaten Tangerang.

## **Pedoman Analisis Dokumen**

Berisi petunjuk melaksanakan telaah dokumen.

1. Menelaah dan menganalisis data pengunjung
2. Menelaah jenis permasalahan yang dikonsultasikan
3. Menelaah Struktur Organisasi
4. Menelaah Mekanisme atau alur Pelayanan Puspaga'
5. Menelaah SOP
6. Memeriksa keakuratan data
7. Menelaah Pedoman Standar Pelaksanaan Puspaga
8. Menelaah dokumen pendukung lainnya
9. Pedoman Observasi



**Lampiran 1 :**

**Informan 1**

**HASIL WAWANCARA**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUSPAGA DI KABUPATEN TANGERANG**

**Nama Informan : Rohika Kurniadisari**

**Nama Informan : Erni Rahmawati**

**Jenis Kelamin : Perempuan**

**Umur : 54 tahun**

**Jabatan : Asisten Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Atas Pengasuhan dan Lingkungan**

**Instansi : Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak KPP dan PA**

**Tanggal wawancara : 11 November 2022**

=====

**Tujuan Puspaga apa Bu?**

Dalam urusan kewenangan konkuren, dalam Undang-Undang 23/2014 tentang pemerintahan daerah bahwa urusan PPPA menjalankan enam kewenangan sub urusan, salah satunya urusan kualitas keluarga adalah provinsi dan kabupaten/kota menyediakan layanan kualitas keluarga untuk mewujudkan kesetaraan gender yang sesuai hak anak. Dalam tempo 2014-2016 barulah inisiasi untuk menyusun kebijakan layanan kualitas keluarga mulai diinisiasi penyusunannya dalam suatu pedoman pengembangan pusat pembelajaran keluarga.

Dalam proses di daerah menerapkan kebijakan pedoman ini memang belum ada peraturan menteri terkait khusus layanan kualitas keluarga. Namun sebelumnya sudah ada Permen PPPA Nomor 6 tentang pembangunan keluarga. Namun Puspaga ini lebih kuat dalam hal menindaklanjuti urusan kewenangan konkuren tentang kewenangan sub urusan kualitas keluarga.

Beberapa daerah sudah mulai menginisiasi tentang pentingnya layanan PUSPAGA ini, 2017-2019 diperkuat dengan adanya pemberian fasilitasi sarana prasarana untuk daerah yang memiliki Puspaga. Kami membuka informasi kepada dinas bagi yang ingin membentuk PUSPAGA akan mendapatkan sarana dan prasarana baik bagi konsultasi seperti meja, kursi, tv, sofa, proyektor. Ini semua adalah bagian untuk memperkuat layanan dan juga disediakan honor bagi konselor PUSPAGA

waktu itu. Sehingga sudah terbentuk 50 PUSPAGA yang mendapatkan sarana dan prasarana dengan pendanaan dari pusat.

Kemudian 2019 tidak boleh lagi jenis bantuan seperti itu, proses koordinasi dalam pengembangan layanan PUSPAGA ini, wajib daerah yang diperkuat menjadi indikator KLA. Dimana KLA menyebutkan adanya lembaga konsultasi konseling keluarga.

PUSPAGA sebagai layanan promotif preventif yang mempunyai tanggung jawab merespon atau menjawab bagaimana Undang-Undang perlindungan anak pasal 26 dimana orang tua mempunyai kewajiban mengasuh, mendidik, melindungi, tumbuh kembang bakat anak, mencegah perkawinan anak, memberikan budi pekerti, dan ini harus ada upaya negara untuk memperkuat orang tua yang saat ini sudah banyak mengabaikan kewajibannya terkait hal tersebut. Sehingga negara tidak hanya menghukum orang tua, tetapi juga memberikan fasilitas supaya orang tua memiliki kemampuan.

Untuk lebih jelasnya, Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) berfungsi sebagai “one stop services/Layanan Satu Pintu Keluarga, Holistik Integratif Berbasis Hak Anak” yaitu meningkatkan kemampuan keluarga, meningkatkan kapasitas orang tua atau orang yang bertanggung jawab terhadap anak dalam menjalankan tanggung jawab mengasuh dan melindungi anak agar tercipta kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik anak, termasuk perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran.

Untuk standar kebijakan, PUSPAGA sudah ada pedoman penyelenggaraan Puspaga yang mengatur tentang standarisasi PUSPAGA dengan menggunakan sistem penilaian evaluasi borang untuk menilai mutu.

Itulah Puspaga ini harus cepat tanggap sebagai bentuk kehadiran negara. Dalam pengembangannya memang layanan ini prioritas untuk edukasi memberikan kesadaran kepada masyarakat, kemudian membuat layanan konsultasi konseling jika membutuhkan kebutuhan lebih lanjut ketika ada proses yang harus dilakukan oleh tenaga profesi, baru layanan penjangkauan jika dibutuhkan untuk dilakukan assessment untuk menjalankan fungsi-fungsi pengasuhan anak di dalam keluarga.

Contoh ketika anak terkena Covid, karena covid diperlukan pengasuhan pengganti yang dilakukan assessment PUSPAGA. Konselor dan psikolog menjadi tantangan pengembangan PUSPAGA ini, saat ini Puspaga menjadi penguatan di KLA yang tersedia di 257 PUSPAGA di provinsi dan kabupaten/kota.

Dalam kebijakan daerah operasional terdapat perbedaan, ada dua hal tanggung jawab dinas PPPA di daerah. PUSPAGA merangkap bidang urusan PPPA yang seluruhnya staf dinas PPPa menjadi konselor di PUSPAGA, kami akhirnya

menetapkan bahwa apabila PUSPAGA melekat dalam fungsi dinas menjadi penetapan, perlu Surat Keputusan (SK) Penetapan melalui SK Bupati untuk memperkuat fungsi administratif maupun penganggaran ketika ada penambahan fungsi layanan. Ini dirangkap oleh bidang menjadi koordinasi layanan yang ada dua bidang sesuai dengan pemikiran dari kepala dinas yaitu hanya bidang kualitas keluarga, namun jika tidak muncul dalam organisasi maka masuk di bawah bidang pemenuhan hak anak. Namun jika dalam organisasi terdapat dua bidang yaitu kualitas keluarga dan pemenuhan hak anak, maka bidang kualitas keluarga ini harus mengembangkan layanan ini berfungsi hingga tiga layanan sampai standarisasi.

Urusan pemenuhan hak anak dicantumkan dalam KLA dimana mereka punya tanggung jawab untuk melakukan percepatan KLA. Sehingga kebijakan ini pengembangannya sampai tingkat kecamatan dan kelurahan melalui layanan terintegrasi PUSPAGA dalam rangka percepatan KLA. Dalam Puspaga itu sendiri ketika layanannya membutuhkan psikolog, beberapa daerah melaporkan kepada bidang organisasi daerah untuk membantu sumber daya psikolog ini, terkadang beberapa daerah di rumah sakit atau di puskesmas ini tidak dimanfaatkan. Oleh karena itu kami koordinasi ke bidang organisasi untuk memanfaatkan SDM itu untuk berkinerja di dinas PPPA melalui Puspaga.

Sumber daya yang ada di kabupaten dengan supervisor bisa dari luar unit tersebut, dipindahkan, atau ditempatkan di dinas PPPA. Mereka bisa dari supervisor tingkat provinsi karena mereka biasanya memiliki sumber daya psikolog. Bahkan juga kadang dirangkap oleh psikolog UPTD, ada juga yang merekrut tenaga honorer untuk masuk ke dalam dinas PPPA sebagai tenaga honorer. Bagaimana dinas PPPA melekatkan tusinya, sehingga akan lebih memperkuat dinas PPPA ketika menjadi tusinya.

Kedepannya, dengan reformasi birokrasi memerlukan fungsional layanan, yang nantinya tidak ada lagi eselon IV di dinas PPPA. Ketika menjadi tusi dinas, karena kepala dinasnya mengerti bahkan sempat merubah peraturan wali kota dengan mengubah tugas fungsi layanan menjadi melekat di dinas PPPA, hal ini terjadi di kota Balikpapan sehingga menjadi tusi dinas.

Sisi lain dinas PPPA kombinasi dengan masyarakat, dimana mereka bekerjasama dengan PKK. Dimana ketua PKKnya otomatis sebagai ketua PUSPAGA dibawah ibu gubernur atau bupati namun dibawah koordinasi dinas PPPA. Provinsi Jawa Barat pelayanannya berbasis masyarakat, seperti ini menggantikan dulu P2TP2A, mereka ini jiwa relawannya kuat sehingga menggunakan PUSPAGA dengan bantuan Bupati dan ibu Bupati untuk menjadi Pembina.

Namun kami ingatkan dalam standarisasi ini masih dibawah koordinasi dinas PPPA.

### **Untuk anggaran dari Provinsi atau Kabupaten berapa bu?**

Itu fleksibel, di dinas biasanya melekat anggarannya dibawah bidang. Kalau untuk mengakomodir konselor itu mereka mempunyai acara sendiri untuk melekatkan honor bagi tenaga konselor tersebut. Besaran anggaran tergantung kebutuhan masing-masing daerah, tidak ada batasan atau ketentuan besaran anggaran yang harus disediakan oleh daerah. Kementerian PP dan PA tidak menentukan besaran anggaran PUSPAGA diserahkan ke daerah masing-masing.

### **Aggaran di Kementerian PP dan PA untuk Puspaga berapa ya bu?**

Di kementerian PP dan PA, khususnya Satker Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Tahun Anggaran 2022, mengalokasikan dana untuk melaksanakan program PUSPAGA diantaranya anggaran untuk : Penyusunan Modul Sertifikasi Kompetensi Psikolog Konselor PUSPAGA Rp. 215.400.000, Uji Publik Modul Sertifikasi Kompetensi Psikolog Konselor PUSPAGA Rp. 98.534.000, Koordinasi Standardisasi PUSPAGA Rp. 43.173.000, Rakorwal Standardisasi PUSPAGA Rp. 74.898.000, Pendampingan Standardisasi PUSPAGA Rp. 26.350.000, Pengembangan E-Learning PUSPAGA Rp. 57.200.000, jadi total dana untuk melaksanakan program PUSPAGA sejumlah Rp. 515.555.000.

### **Kalau komunikasi antar organisasi karena PUSPAGA ini akan terimplementasi jika ada komunikasi organisasi antar lembaga, organisasi mana yang mendukung?**

Di pusat komunikasi dengan kementerian yang mempunyai tanggung jawab keluarga, paling tidak mereka mengetahui fungsi PPPA selain ada di target RPJMN, sampai renstra maupun pada perjanjian kinerja. Kalau di daerah, komunikasi ini kementerian PPPA berkomunikasi dengan dinas PPPA sebagai penyedia layanan dan dinas PPPA sebagai Pembina dari layanan kualitas keluarga.

Kami berkoordinasi dan melakukan komunikasi langsung ke kabupaten/ kota untuk memperkuat kelembagaan PUSPAGA ini agar sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan. PUSPAGA ini dalam hal layanan komunikasi dengan instansi vertikal yang ada di provinsi seperti pengadilan agama, juga komunikasi dengan layanan yang terkait dengan operasional PUSPAGA yang layanan edukasi, konseling dan penjangkauan.

Asdep Pengasuhan sering mengundang Kepada Dinas PP dan PA juga pengelola PUSPAGA untuk mengikuti sosialisasi dan pertemuan terkait standarisasi pelaksanaan PUSPAGA, hal ini dimaksudkan untuk 1 Meningkatkan penguatan dan pengembangan layanan kualitas keluarga PUSPAGA; 2. Meningkatkan kapasitas layanan PUSPAGA sesuai standar; 3. Meningkatkan layanan PUSPAGA sesuai persyaratan standar yang dipakai untuk keperluan audit penyelenggaraan

PUSPAGA atau penilaian kesesuaian (conformity assesment) dalam rangka sertifikasi.

**Di intansi pusat dengan kementerian lembaga mana saja?**

Komunikasi dan koordinasi dengan Kemensos, BKKBN, Mahkamah Agung, Kementerian Pendidikan, Kemenko PMK untuk kebijakan PUSPAGA.

**Kalau menurut ibu, karena Puspaga ini kebijakan pemerintah, Kemen PPPA membawahi bidang PP dan perlindungan anak. Karakteristik struktur birokrasi ini bagaimana SOP di Puspaga?**

Untuk SOP Kementerian PPPA dengan kementerian lain dalam menunjang tuisi kemen pppa memang harusnya ada SOP khusus. Kadang kami menggunakan SOP koordinasi saja, di daerah sudah mempunyai SOP yang memang bagian dari pedoman standarisasi PUSPAGA karena disitu sangat detail bagaimana SOP layanan dan mutu bakunya ditetapkan oleh kami.

**Peran KPPPA di dalam Puspaga sebagai apa ya bu**

**Sesuai dengan SURAT EDARAN NOMOR 5 7 TAHUN 2020 TENTANG PENGEMBANGAN LAYANAN PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA DIDAERAH, bahwa Kementerian PP dan P mendorong Propinsi/ Kabupaten/ Kota untuk,** rnengembangkan lernbaga layanan PUSPAGA dengan rnengacu pada Pedornan Standar PUSPAGA yang ditetapkan oleh Kernen PPPA. Disamping mendorong untuk pembentukan Puspaga Kementerian PP dan PA membuat Pedoman Standar Pelaksanaan Puspaaga, juga melakukan evaluasi kebijakan Puspaga apakah sudah berjalan sesuai rencana dan terarah, dan membuat standarisasi Puspaga agar adanya keseragaman dalam pelayanan di Puspaga.

**Sikap para pelaksana ini bagaimana menurut Kemen PPPA?**

Seperti saya katakan tadi, saat ini karena PUSPAGA ini menjadi penguatan di KLA yang saat ini tersedia 257 Puspaga di provinsi dan kabupaten/kota. Artinya dari 514 kabupaten kota sudah terlaksana 257 sudah terlaksana 50%, hal ini menunjukkan bahwa kebijakan ini di dukung oleh Dinas PP dan PA diseluruh Indonesia. Meskipun dalam pelaksanaannya masih membutuhkan evaluasi monitoring.

**Puspaga Al-Inayah ini bentuknya yayasan yang memiliki paud dan TK**

**Ibu Rohika**

Kami mengerti dinas PPPA ini memliki tanggungjawab, namun karena keterbatasan anggaran sehingga meminta kerjasama dengan yayasan yang bisa menginisiasi PUSPAGA. Ini banyak dilakukan, karena ada hal yang harus diperbaiki dalam

mekanisme organisasi dan organisasi masyarakat dalam fungsi pelayanan ini harus termonitor meskipun fungsi layanan ini dilaksanakan oleh lembaga masyarakat. Koordinator program tetap harus mempunyai tanggungjawab untuk pelaksanaan PUSPAGA ini, harusnya ada fungsi dinas yang melakukan koordinasi terkait mekanisme SOP layanan dengan tanggungjawab dari dinas PPPA juga.

Untuk Pelaksanaan PUSPAGA di buku pedoman Standar Pelaksanaan Puspaga juga sudah mencantumkan SOP yang harus disediakan oleh layanan PUSPAGA. Seluruh program layanan tersebut secara rinci dilengkapi dengan beberapa SOP (tercantum dalam lampiran), yang meliputi: a. SOP Penerimaan b. SOP Identifikasi Layanan c. SOP Konsultasi d. SOP Konseling e. SOP Bimbingan Masyarakat f. SOP Rujukan g. SOP Penjangkauan h. SOP Pelatihan i. SOP Pemberian Informasi, dan j. SOP Sosialisasi

Dalam pedoman kami, sebulan sekali harus melaporkan kepada dinas PPPA sebagai koordinator dari program layanan ini ketika PUSPAGA ini diinisiasi oleh lembaga masyarakat. Pasti tidak akan cukup jika hanya memiliki satu saja, bolehkah Fatayat NU membuat PUSPAGA, Aisyiah membuat PUSPAGA, tentu saja boleh. Namun dibawah koordinator program dinas PPP untuk fungsi monitoring layanan ini.

Untuk penguatan kapasitas ketika dinas PPPA kerjasama dengan masyarakat, seharusnya dinas PPPA juga terlatih terkait kapasitas fungsi pengasuhan. Saya sampaikan bolehkah keduanya membuat layanan kembali fungsi dinas juga, saya bilang harus karena lembaga masyarakat tentunya tergantung kebijakan lembaga yayasan, tergantung unsur masyarakat, tetapi kalau dinas PPPA harus ada urusan wajib. Jangan karena anggaran, layanan ini prioritasnya edukasi dengan diuntungkan adanya media sosial, oleh karena itu layanan ini harus gencar dengan mitra. Flyer juga bisa disebar melalui media sosial sehingga tidak perlu berbasis anggaran, tetapi tuisi ini bisa dilakukan dengan memanfaatkan media sosial.

**Lingkungan sosial ekonomi dan politik apakah mendukung atau tidak Bu, terhadap kebijakan ini?**

Ekonomi mendukung karena berbicara penguatan pengasuhan orang tua yang diamanatkan undang-undang itu terkait juga kewirausahaan bagi perempuan. Keluarga itu juga ada bagaimana fungsi ekonomi menguatkan keluarga di dalam dimensi strata ekonomi rendah, kita mempunyai sumber daya pelatihan dimana mereka juga melakukan manajemen keuangan ekonomi. Kewirausahaan perempuan menjadi salah satu fungsi, dimana jika perempuan memiliki kekuatan bisa membangun kelekatan yang baik dengan anak.

Kemudian fungsi politik ini terkait mengambil keputusan, diharapkan dalam materinya membangun kesetaraan dalam keluarga, fungsi kesetaraan dalam

pengasuhan menjadi penting karena anak harus mendapatkan nilai kesetaraan yang memang tugasnya dinas PPPA membangun keluarga setara gender dan hak anak.

### **Strategi yang akan dibangun untuk meningkatkan kebijakan Puspaga?**

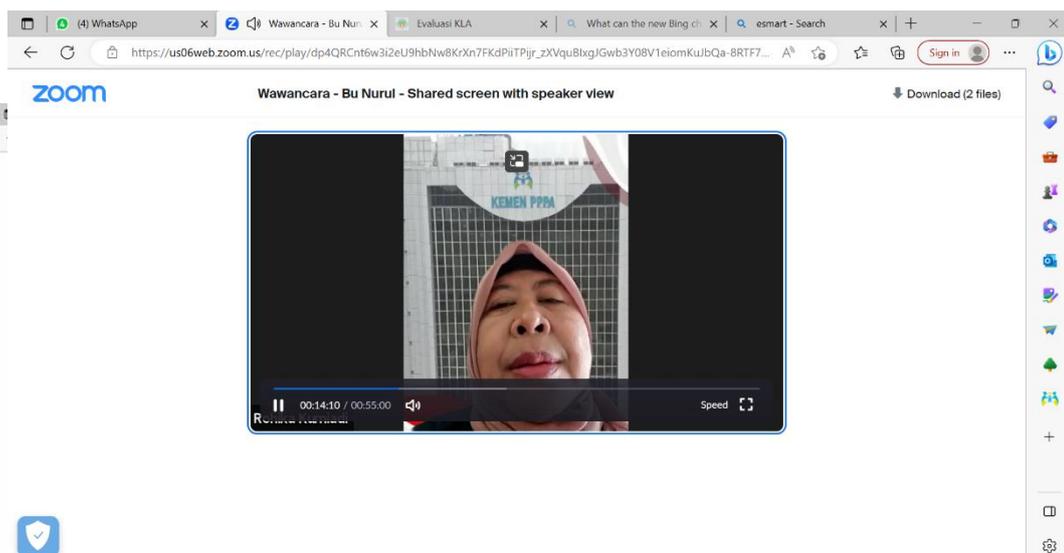
Strategi melalui sumber daya, melalui anak. Dengan melibatkan forum anak, karena forum anak harus teredukasi terkait layanan ini untuk menyampaikan layanan ini kepada orang tua maupun kepada siapapun. Kemudian selanjutnya melalui keluarga, kita tidak bisa intervensi langsung namun melalui peningkatan kapasitas keluarga itu sendiri. Mengisi kekosongan sulitnya mendapatkan psikolog, kami bekerjasama dengan HIMPSI untuk memperkuat konselor untuk melakukan konseling awal karena keterbatasan psikolog.

Bimtek dan pelatihan ini menjadi penting, Kementerian PPPA setiap tahun ada agenda pelatihan untuk memperkuat konselor dan psikolog. Kami memperkuat koordinasi dengan kementerian/lembaga dengan melibatkan dalam monitoring dan evaluasi KLA.

Penguatan regulasi melalui permen khusus untuk standarnya, ini tidak bisa hanya termaktub dalam KLA. Kita mengadvokasi melalui perpres nomor 102 tentang strategi nasional penghapusan kekerasan terhadap anak, sudah ada target tentang kualitas keluarga. RBRA sudah harus 120 pada tahun 2024.

Kami juga mendorong beberapa daerah memiliki perda tentang ketahanan keluarga, memperkuat dan mempunyai tuis yang harus dilakukan. Kami sampaikan dalam penguatan kedepan termasuk penguatan koordinasi dengan lembaga mitra, dengan adanya perjanjian kerjasama dengan Mahkamah Agung dan badan peradilan agama tentang perkara anak dalam dispensasi perkawinan. Seluruh pengadilan agama akan menindaklanjutinya, dari PKS ini tidak akan menerima permohonan kalau tidak ada rekomendasi dari dinas PPPA terkait dispensasi perkawinan. Selama ini permohonan dispensasi perkawinan dilakukan melalui PUSPAGA.

Akses layanan ini harus diinformasikan secara masif oleh penerima manfaat, harus terkenal seperti posyandu dan puskesmas. Harus mempunyai konten PUSPAGA yang bisa disampaikan seperti youtuber menggunakan media sosial untuk menyebarluaskan promosinya. Beberapa daerah memiliki PUSPAGA keliling, bahkan menjadi inovasi pelayanan publik. Bahkan PUSPAGA ada yang diberi



tempat di mall di jember, dengan nama **Bangga Puspaga** dimana ini miliknya BKKBN sebetulnya, mereka kerjasama dengan urusan keluarga berencana. Jadi untuk dinas yang irisan dengan urusan wajib lainnya bisa menjadi peluang. Yang penting penerima manfaat ini harus lintas kabupaten tidak apa-apa, tidak terbatas wilayah meskipun konseling diutamakan untuk wilayahnya namun untuk edukasi tidak terbatas.

## Informan 2

### HASIL WAWANCANA

#### IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUSPAGA DI KABUPATEN TANGERANG

**Nama Informan** : Dewi Yanti, SE, MSi  
**Jenis Kelamin** : Perempuan  
**Umur** : 54 tahun  
**Jabatan** : Pengerak Swadaya Masyarakat Kelembagaan Data dan Informasi Gender  
**Alamat** : Dinas PP dan PA Kabupaten Tangerang  
**Tanggal Wawancara** : 14 November 2022

=====

#### H. Tujuan dan Sasaran dan standar kebijakan PUSPAGA

5. Apakah tujuan PUSPAGA?

1. Tersedianya “one stop service” layanan satu pintu keluarga, holistic, integratif berbasis hak anak, 2. Tersedianya tempat pembelajaran keluarga melalui Pendidikan bagi orang tua, calon orang tua (remaja).

6. Apakah sasaran PUSPAGA?

Anak, orang tua, wali, calon orang tua (remaja dan dewasa) yang mempunyai masalah dalam pengasuhan keluarga atau yang mempunyai permasalahan keluarga.

7. Bagaimana standar kebijakan PUSPAGA?

Standarisasi PUSPAGA dilaksanakan sesuai dengan mandat undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun komponen Standarisasi PUSPAGA terdiri dari Kelembagaan, Sumber Daya, Program dan layanan, SOP layanan, Protokol penanganan resiko bencana dan adaptasi kebiasaan baru, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

8. Apa sudah melakukan Pendampingan terhadap pelaksanaan PUSPAGA di daerah?

Belum melakukan pendampingan secara masif, karena untuk tahun yang lalu masih banyak yang belum tau tentang PUSPAGA, jadi lebih banyak sosialisasi PUSPAGA ke Kecamatan dan pembinaan ke sekolah-sekolah.

Namun sebelum tahun 2020, pelaksanaanya rutin, hanya saja terkendala dengan adanya Covid-19.

9. Berapa ketercapaian Puspaga yang terbentuk Bu?  
"Sekarang di kecamatan sudah ada Puspaga. Kecamatan Curug, Kelapa Dua, Kecamatan Tigaraksa, Kecamatan Rajeg, dan Puspaga di Kantor Dinas PP dan PA Kabupaten Tangerang".

#### **I. Sumber daya Puspaga**

8. Berapa Jumlah Sumber Daya Manusia yang dibutuhkan di Puspaga (ada berapa orang) ? Minimal 5 orang terdiri dari Psikolog dan konselor karena dibagi untuk melayani lima PUSPAGA. Kalau di PUSPAGA Kabupaten Tangerang ada tenaga Psikolog yang setiap hari datang dan memberikan layanan.
9. Bagaimana Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan (kebutuhan ruangan dan peralatannya)? Mempunyai ruangan tersendiri ada tempat konseling, ada meja kursi, ada modul PUSPAGA, ada Buku-buku di Ruang PUSPAGA
10. Apakah sarana dan prasarana sudah dipenuhi? Sebagian sudah dipenuhi
11. Bagaimana dengan sumber daya anggaran yang dibutuhkan PUSPAGA (jumlah anggaran) ? sumber daya anggaran dari APBD tahun 2022 Rp. 90.000.000 untuk 5 PUSPAGA di Kabupaten Tangerang yaitu : Kalau sebelumnya 5 kecamatan, kalau sekarang direncanakan akan diimplementasikan ke seluruh kecamatan ada PUSPAGA. Kecamatan curug, kelapa dua, tigaraksa, rajeg, dan Kabupaten Tangerang.  
Anggaran Rp.90.000.000 digunakan untuk membayar honorarium 2 Psikolog, dan untuk pengembangan PUSPAGA juga untuk sosialisasi parenting dan sosialisasi PUSPAGA di kecamatan dan sosialisasi keberadaan PUSPAGA di sekolah-sekolah, juga untuk biaya promosi PUSPAGA.
12. Bagaimana ketersediaan staf dalam menjalankan kebijakan PUSPAGA?  
Ketersediaan staf masih merangkap dengan kegiatan atau bidang PP dan PA tetapi untuk PUSPAGA di kecamatan sudah mempunyai kaderisasi
13. Apakah SDM berkompeten terhadap tugas yang dijalankan ? SDM berkompeten
14. Apakah SDM mempunyai ketrampilan dan keahlian dan mengerti apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya ? ya, mempunyai keahlian dan ketrampilan di bidangnya.

#### **J. Komunikasi antar organisasi mengenai aktivitas dan aktifitas implementasi**

8. Apakah standar, sasaran dan tujuan dan kebijakan PUSPAGA sudah dikomunikasikan kepada para pelaksana ? sudah
9. Apakah komunikasi tersebut ada kejelasan, konsisten dan seragam dari sumber informasi ? sudah ada kejelasan dan konsistensi, juga seragam dari sumber yang sama
10. Bagaimana komunikasi antar organisasi ? sudah berjalan komunikasi dengan OPD tingkat kesamataan
11. Apa kejelasan peran dan tugas masing-masing organisasi? peran dan tugas organisasi perangkat daerah di kecamatan yaitu menyediakan tempat pelayanan PUSPAGA memberikan jadwal kegiatan PUSPAGA menyediakan peserta atau audiensi peserta atau pelayanan PUSPAGA.
12. Apakah komunikasi tersebut mengalami gangguan atau distortion baik yang disengaja atau tidak disengaja? sampai saat ini tidak ada gangguan selain masa pandemi covid covid karena pada saat pandemic komunikasi atau pertemuan langsung di batasi.
13. Bagaimana aktifitas implementasinya ? masih berjalan sosialisai dan konseling.
14. Apakah ada koordinasi dengan pihak-pihak terkait, (sebutkan peran dan tanggung jawabnya) ? ada, yaitu dengan pihak sekolah dan pihak kecamatan selaku kepanjangan tangan Dinas PP dan PA Kabupaten

#### **K. Karakteristik Organisasi Pelaks adana (struktur birokrasi)**

6. Apa dasar hukum untuk melaksanakan kebijakan PUSPAGA?  
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Keputusan Bupati Tangerang Nomor 463/Kep.172-Huk/2018 tentang Pembentukan Pusat Pembelajaran Keluarga
7. Apa ada SOP terhadap pelaksanaan Puspaga tersebut? ada
8. Apakah SOP tersebut berjalan? masih berjalan
9. Apakah ada pemantuan terhadap SOP tersebut? ada SOP dipantau agar pelaksanaan pelayanan Puspaga sesuai dengan SOP
10. Apakah organisasi mempunyai kepentingan terhadap program ini? ya, punya kepentingan.
11. Apa peran dinas PP dan PA dalam implementasi PUSPAGA?  
bertanggung jawab dalam rnelakukan koordinasi, rnyusun kebijakan, dan rnyediakan dukungan operasional untuk pelaksanaan PUSPAGA di tingkat daerah kabupaten/kota serta melakukan pendampingan dan menyediakan tenaga konseling.

#### **L. Sikap Para Pelaksana**

5. Badan atau unit yang disiapkan untuk melaksanakan kebijakan PUSPAGA? APBD kecamatan atau sekolah.
6. Apakah repon sikap para pelaksana menerima atau menolak kebijakan tersebut, kalau menerima apa yang dilakukannya ?  
 Dengan adanya kebijakan PUSPAGA, Dinas PP dan PA Kab Tangerang sudah membentuk 5 PUSPAGA di 5 kecamatan. Kecamatan Curug, Kelapa Dua, Kecamatan Tigaraksa, Kecamatan Rajeg, dan Puspaga di Kantor Dinas PP dan PA Kabupaten Tangerang. Di tahun yang akan datang di targetkan semua kecamatan ada layanan Puspaganya.  
 Kegiatan yang dilakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah tentang pelayanan Puspaga dan Kecamatan. Juga menyediakan tenaga konseling untuk didatangkan ke Puspaga membantu warga yang akan melaksanakan konsultasi.
7. Apakah para pelaksana tersebut mempunyai pemahaman dan pandangan yang sama terhadap kebijakan tersebut ? Mempunyai pemahaman dan pandangan yang sama dengan PUSPAGA, kegiatan PUSPAGA di 5 kecamatan sudah berjalan dengan baik sudah ada warga yang melakukan konseling mengenai permasalahan perngasuhan anak.
8. Bagaimana para pelaksana melaksanakan secara intensitas kebijakan tersebut ? melaksanakan sosialisasi PUSPAGA di Kecamatan dan memberikan pemahaman PUSPAGA kepada anak-anak sekolah beserta koseing yang dilaksanakan oleh psikolog PUSPAGA.

#### **M. Lingkungan Sosial, Politik dan Ekonomi**

4. Apakah lingkungan sosialias ekonomi dan politik mendukung kebijakan tersebut ?  
 ya, mendukung
5. Kalau mendukung contoh kegiatannya seperti apa ? memberikan pemahaman dan ilmu mengenai PUSPAGA dengan kegiatan *go to scholl* ke sekolah-sekolah
6. Apakah sudah membangun jejaring dengan *stake holder* yang lain ? ya, sudah.



## Informan 2

### HASIL WAWANCANA

#### IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUSPAGA DI KABUPATEN TANGERANG

**Nama Informan** : Ibu Mawarni  
**Jenis Kelamin** : Perempuan  
**Umur** : 50 tahun  
**Jabatan** : Kabid PP dan PA  
**Alamat** : Dinas PP dan PA Kabupaten Tangerang  
**Tanggal Wawancara** : 14 November 2022

=====

Pertanyaan untuk melengkapi hasil penelitian

- a. Bagaimana peran dan tanggung jawab Dinas PP dan PA terhadap pelaksanaan Puspaga, Apa ada hambatan dan kesulitan
- b. Bagaimana pendampingan program kerja PUSPAGA ke PUSPAGA Al-Innayah, bentuk pendampingannya seperti apa
- c. Mohon penjelasan tentang evaluasi dan monitoring dan laporan tentang pelaksanaan PUSPAGA di Kabupaten Tangerang
- d. Bagaimana hasil evaluasi dan monitoring ditindaklanjuti dan seperti apa tindak lanjutnya

JAWABAN

1. Sebagai pembina, fasilitator dan pendamping Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), hambatan pelaksanaan PUSPAGA
  - Menyesuaikan Jadwal pembinaan PUSPAGA dengan psikolog
  - Apabila ada kasus, pihak keluarga sulit untuk menyampaikan permasalahannya secara terbuka
  - Ada budaya risih dan malu untuk keluarga korban
2. Melaksanakan pembinaan, monitoring terhadap kegiatan Puspaga Al-Innayah, memfasilitasi narasumber psikolog untuk mensosialisasikan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam Puspaga
3. Evaluasi dan monitoring Puspaga di Kabupaten Tangerang
  - Melakukan sosialisasi Puspaga ke 4 Sekolah SMP di Kabupaten Tangerang tentang pencegahan kenakalan remaja

- Melakukan pembinaan ke 10 Lokasi Kecamatan di Kabupaten Tangerang
  - Melakukan konseling terhadap korban kekerasan terhadap anak dengan memfasilitasi psikolog terhadap 3 kasus di 3 kecamatan di wilayah Kabupaten Tangerang
4. Evaluasi kegiatan Puspaga pada tahun 2022, berjalan dengan baik, Rencana kegiatan Puspaga pada tahun 2023 dilakukan sosialisasi tambahan di 11 Kecamatan yang belum digarap pada tahun 2022. Untuk korban kekerasan terhadap anak telah dilakukan fasilitasi pendampingan oleh psikolog (penanganan tindak lanjut kasus oleh Bidang PPA)

**Informan 3**

**HASIL WAWANCANA  
DENGAN PUSPAGA AL-INAYAH TANGERANG  
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUSPAGA DI KABUPATEN TANGERANG**

**Nama Informan** : **IBU NADHIROH**  
**Jabatan** : **Ketua Puspaga Tangerang**  
**Intansi** : **Puspaga Al Inayah Tangerang**  
**Tanggal Wawancara** : **7 November 2022**

=====

**IBU NADHIROH**

**Apakah ibu mengetahui tujuan PUSPAGA?**

Tujuan PUSPAGA untuk memberikan pembelajaran kepada masyarakat umum yang memerlukan, terutama kita fokuskan kepada perempuan dan anak. Tetapi, misalnya ada keluarga yang bermasalah, atau ada keluarga yang kurang mampu di bawah sejahtera kalau kita mumpuni akan kita bantu dengan santunan.

**Sasaran PUSAPAGA?**

Sasaran PUSPAGA pada dasarnya memberikan pembelajaran yang sifatnya preventif, terutama anak tidak terjadi pelecehan, terjadi kekerasan, ke pengasuhan anak. Kita banyak bergerak di sekolah melalui acara parenting sebulan sekali mesosialisasikan ke orang tua.

**Standart kebijakan?**

Dinas belum memberikan rambu-rambu atau SOP, SOP dari Dinas PP dan PA belum di berikan ke PUSPGAGA. Puspaga Al Inayah awalnya milik Yayasan Al Inayah. Kemudian tahun 2017 Dinas PP dan PA mengakomodir agar menjadi PUSPAGA binaan kabupaten, namun hanya sebatas legalisasi, dalam hal SDM belum ada pembinaan lebih lanjut dari dinas. Hanya setiap bulan dikirimkan dua psikolog oleh dinas kalau awal pembentukan di kirim 4 psikolog setiap bulan karena yang konsultasi banyak, sekarang setiap bulan di kirim 2 orang psikolog, setiap hari rabu. jumlah pengurus ada 12 oarng dengan konsultan ada 2 orang.

### **Apakah sasaran PUSPAGA Sudah Tercapai**

Sasaran Puspaga sudah tercapai, karena sudah banyak Ibu-Ibu yang melakukan konsultasi ke PUSPAGA, rata-rata perbulan 3 orang sampai 7 orang, karena banyak problem dalam pengasuhan anak. Bisa diketahui dari matrik laporan.

### **Sarana prasarana apakah sudah memadai?**

Sudah cukup memadai Bu seperti ada meja dan kursi, ada ruang konsultasi, ruang laktasi dan ruang pertemuan, namun jika pertemuan besar kami di aula 1 dan aula 2.

### **Anggaran berapakah bu untuk kegiatan PUSPAGA?**

Kami anggaran dari yayasan, dari dinas tidak ada sama sekali. Pengurus disini juga tidak diberikan imbalan, dengan staff yang menjalankan 12 orang juga tidak ada gaji, tapi dari yayasan, PUSPAGA Al Inayah termasuk PUSPAGA mandiri karena semua pembiayaan dari yayasan. Berharap ada anggaran untuk mengadakan sosialisasi pengasuhan yang layak untuk atau edukasi parenting bagi warga, tetapi kalau hal ini disampaikan ke Dinas PP dan PA, jawabnya anggaran masih terbatas sehingga belum bisa memberikan anggaran untuk sosialisasi ke Puspaga Al Inayah.

### **Kalau untuk kegiatan sosialisasi parenting anggaran darimana Bu, untuk membayar narasumber dan konsumsi peserta?**

Untuk kegiatan sosialisasi parenting anggaran, maaf kami tidak pernah mendapatkan biaya apapun dari dinas PPPA Bu, terkait narasumber dan snack dari yayasan. SDM yang kompeten menjalankan 12 orang dengan 2 konsultan. Sesuai apa yang dibutuhkan masyarakat kami siap, yang penting kami bisa melayani masyarakat yang membutuhkan.

### **Rata-rata tingkat pendidikan SDM PUSPAGA apa saja?**

Rata-rata guru, sarjana yang berjumlah 6 orang. Kaitannya dengan psikolog, kalau dulu dikirim 4 sekarang dikirim 2, kalau kekurangan yang kami jalankan sesuai dengan kebutuhan kita. Saya juga sudah pernah mengikuti pelatihan dari kementerian PPPA dan diberikan sertifikat.

### **Berapa orang yang bersertifikat?**

Baru ada 2 orang yang bersertifikat. Rata-rata pendidikan SDM (pengurus) PUSPAGA adalah guru, sarjana pendidikan berjumlah 6 orang, dan sisanya lulusan SMA. Salah satu pengurus adalah dokter putri Bu Nadiroh Ketua Puspaga, sehingga kalau ada yang berkonsultasi tentang gizi anak-anak bisa ke bu dokter Inayah, dan bu Dokter Inayah juga sebagai Humasnya Puspaga Al Inayah karena

bu dokter suka mempromosikan PUSPAGA AI Inayah ke Medsos dan ke warga sekitar dengan membuat video.

**Bagaimana kalau ada yang berkonsultasi dengan masalah yang tidak terlalu berat.**

Biasanya kalau ada klien yang berkonsultasi dengan masalah yang tidak terlalu berat langsung ditangani para guru, karena guru juga dibekali dengan ilmu psikolog, bahkan lebih mengerti mengenai pola didik anak. Misalnya ada yang konsultasi anak malas membaca, anak malas menulis, anak maunya main saja, bagaimana caranya memotivasi anak agar mau belajar tidak hanya bermain, atau membagi waktu antara belajar, bermain dan mengaji, karena porsi pembagian waktu tidak boleh membebani anak-anak dengan jadwal yang padat, masalah seperti itu biasanya para guru atau pengurus yang menjawab. Tetapi kalau masalahnya berat, maka pengurus menyarankan agar dikonsultasikan ke konselor atau psikolog

**Kebijakan dari dinas PPPA sudah dikomunikasi dengan jelas Bu?**

Sebetulnya sudah, hanya selintas. Kalau dari pihak disini sudah menyampaikan keluh kesah kaitannya dengan pendanaan, namun mereka bilang belum ada. Informasi sudah jelas

Komunikasi dengan siapa saja dalam menjalankan PUSPAGA ini, apakah antar organisasi?

Dengan muslimat NU, PKK, dengan pak Camat karena beliau juga mengakui PUSPAGA AI Inayah, Himpaudi, ikatan guru raudhatussalamah, anggota PKK baik tingkat RT maupun tingkat RW terkait sosialisasi tentang pengasuhan dan sekitar tumbuh kembang anak.

**Antar organisasi ada perannya tidak Bu dengan hal yang tadi ibu sebutkan?**

NU membantu menyalurkan buku-buku, dengan dinas perpustakaan kabupaten Tangerang karena ada yang kenal akhirnya dibantu buku.

Ketika komunikasi dengan organisasi, apakah ada kendala Bu?

Tidak ada, namun seharusnya ketika ada yang kita ajak rapat itu kan bisa diberikan pengganti transport, namun tidak bisa.

Implementasi PUSPAGA disini bagaimana bu pelaksanaannya? kita sesuai kebutuhan masyarakat, setiap hari dibuka konsultasi walaupun sambil dagang.

**Berapa orang yang konsultasi setiap bulan?**

Kalau dengan psikolog bisa 8 orang, kalau yang datang sambil baca sampai 30 orang. Tetapi yang sambil ngobrol.

Koordinasi dengan organisasi dinas PPPA dan lainnya berjalan lancar ya bu?

Alhamdulillah disambut baik, namun kaitannya dengan sumber daya dan dana masih sulit.

**Apakah ada SOP dari ibu untuk PUSPAGA AI Inayah?**

Ada

**SOP tersebut apakah sudah berjalan dan ada pemantauan?**

Kalau ada yang konsultasi kebetulan psikolog tidak datang, nanti akan dibantu oleh saya "konselor". Kalau kaitannya tentang keluarga nanti dibantu Pak Rohimin, beliau juga pensiunan KUA.

**Respon seperti apa jika ibu mendukung PUSPAGA ini?**

Kalau saya memang sudah senang bu, disini dengan keadaan saya seperti ini dari urusan perut sampai urusan yang lain pasti mengadunya ke saya. Tidak hanya masalah keluarga.

Pengurus berjumlah 12 orang tidak ada gaji sama sekali mereka ikhlas dan senang bisa membantu warga yang mempunyai permasalahan, bantuan dana hanya ada kalau untuk sosialisasi dan bantuan tenaga konseling.

**Ibu sudah mempunyai pemahaman terkait kebijakan PUSPAGA?**

Intinya dengan adanya Puspaga ini bisa menjadi pemecahan masalah masyarakat, walaupun kalau bisa kita bantu ya dibantu, namun tidak yang kita bantu dalam bentuk nasihat.

**Ada kasus yang berat Bu?**

Seorang janda dia awalnya suaminya itu punya penyakit, sehingga dia tidak suka akhirnya terjadi perceraian. Namanya ini ayu, setelah cerai dia ketemu orang yang bilangny mau ngobatin, nah ternyata setelah diobatin katanya kalau mau sembuh kami harus pindah jangan nyampur sama orang tua. Setelah ngontrak ternyata dia malah dikerjain sama orang ngobatin, ternyata hamil dan ternyata setelah hamil itu keguguran. Namun tidak punya biaya, akhirnya karena tidak punya uang dan akhirnya digadaikan itu motor sampai perhiasan.

Akhirnya dicarilah oleh kita pelakunya itu, sampai ke rumah orang tuanya. Itu sampai dimarahi oleh orang tuanya, kita jelasin ini korban sampai hamil dan sakit

sampai habis motor dan gelang. Nah ini dia hanya ingin minta kejelasan pertanggungjawaban bukan untuk dinikahi, awalnya mereka janji mau tanggungjawab.

Tapi karena ini orang janji terus, kita malah seperti main kucing-kucingan. Sehingga sampai 4 alamat dicari tidak ketemu.

### **Apa peran dan tanggungjawab PUSPAGA AI Inayah?**

Melaksanakan kebijakan layanan PUSPAGA dengan memberikan pelayanan atau melayani klien yang akan berkunjung atau mau berkonsultasi ke PUSPAGA AI Inayah, apabila kasusnya ringan bisa dilayani oleh pengurus PUSPAGA, apabila kasusnya berat maka akan dilaporkan ke dinas PP dan PA untuk mendapatkan layanan konseling dari koselor, apabila kasusnya mengenai masalah keluarga atau perkawinan maka akan di konsultasikan ke Bapak Rohimin suami Bu Nadiroh kebetulan sebagai pensiunan penghulu pegawai KUA.

### **Lingkungan sosial di sekitar PUSPAGA mendukung Bu? Apa saja contoh dukungannya?**

Sangat mendukung keberadaan PUSPAGA, contohnya ketika kita ada acara dibantu. Seperti merapihkan motor ketika ada acara.

Apa strategi untuk meningkatkan pelayanan PUSPAGA? Supaya PUSPAGA ini banyak yang datang melakukan konsultasi.

Saya ingin memperluas jejaring dengan sosialisasi, awalnya di tingkat TK, saya ingin memperluas ke SD, SMP dan SMA. Kalau bisa mendapatkan 10.000 informasi tentang PUSPAGA agar mereka mengetahui keberadaan PUSPAGA ada disini.

### **Ada hambatan tidak Bu?**

Hambatannya terkait pendanaan, tetapi seperti ke SD dan SMP semuanya kenal. Konsultasi dengan Pembina yayasan jika kendalanya terkait anggaran.

### **Harapannya PUSPAGA?**

Saya berharap PUSPAGA ini bisa memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat, tetapi Alhamdulillah di Jakarta Barat sudah ada PUSPAGA AI Inayah, yang ada kaitannya konsultasi tentang perkawinan

### **Dampaknya bagaimana Bu?**

Kenakalan anak-anak menurun, karena ada sosialisasi. Kendala hanya dari sumber dananya belum kelihatan, sehingga kita mengisi borang tidak sempurna karena keterbatasan.

**IBU ETTI**

Sebagai pengurus PUSPAGA, apakah ada kesulitan selama menjadi pengurus?

Tidak ada kesulitan, karena ada pendampingan juga terutama penyusunan laporan dari pengurus lainnya.

**Ada pelatihan tidak Bu?**

Ikut pelatihan di dinas.

**Saran untuk membuat laporan? Apa yang diharapkan?**

Tidak ada, karena kalau ada yang mau konsultasi, maka saya yang mendata saja kalau ada tamu yang datang. Menampung keperluan tamu, di bagian administrasi.



#### **Informan 4**

### **HASIL WAWANCANA**

#### **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUSPAGA DI KABUPATEN TANGERANG**

**Nama Informan** : **Nurhanudi**  
**Jabatan** : **Sekretaris Camat Rajeg**  
**Intansi** : **Kecamatan Rajeg**  
**Tanggal Wawancara** : **14 November 2022**

=====

#### **Mengenai program PUSPAGA, bagaimana menurut Bapak program tersebut?**

Program yang baik dalam rangka perlindungan terhadap keluarga terutama ibu dan anak, kita menjaga keluarga agar menjadi sejahtera. Program ini sudah berjalan di Kecamatan Rajeg, salah satu program unggulan di Tim penggerak PKK dan pemberdayaan masyarakat. Puspaga ini setiap unit ada, masing-masing sudah menjalankan program PUSPAGA, terbentuk di 12 desa dan 1 kelurahan. Dari kecamatan Rajeg mendukung sekali, diharapkan dengan adanya PUSPAGA maka orang tua dapat mengasuh dan merawat anak sesuai dengan hak-hak anak, tidak ada lagi kekerasan terhadap anak atau kekerasan dalam keluarga

#### **Untuk sarana bagaiman Pak? Apakah ada bantuan?**

PUSPAGA sudah kita anggaran disetiap tahun anggaran, dalam anggaran pagu indikatif kecamatan tahun 2022 dan tahun 2023.

#### **Kalau pendampingan dari kecamatan bagaimana?**

Kita ada pertemuan PUSPAGA, kita lakukan sosialisasi 2 kali. Selain itu kegiatan lain kami sisipkan juga sesuai tujuan dari Puspaga. Kemarin juga ada PATBM kami sudah memiliki, sejalan dengan PATB dengan integrasi.

#### **Kasus anak ada berapa pak?**

Kami kurang tau, dikita justru menimpa pada kasus pelecehan terhadap perempuan yang mencuat. Sudah ada yang dilakukan konseling, kalau kasus anak, belum saya cek lagi. Kekerasan dalam rumah tangga itu biasanya kalau bisa dimediasi ya kita selesaikan, kalau sampai ke laporan polisi itu jarang, sehingga kalau bisa diselesaikan dengan mediasi. Kalau kasus anak biasanya diselesaikan dengan kekeluargaan.

### **Kalau pola asuh di Kecamatan Rajeg menurut pengamatan Bapak? Pola asuh keluarganya bagaimana?**

Kalau berhubungan dengan kekerasan, Kecamatan Rajeg masih menganut religiusitas tinggi, sehingga pendekatannya agamanya tinggi. Namun karena sekarang masuk daerah urban, jadi banyak dari luar kesini sehingga ada pergeseran nilai yang biasanya habis sekolah ngaji, jadi karena pergeseran itu banyak perubahan. Banyak informasi dari luar terutama dunia maya.

### **Dukungan ekonomi politik adakah untuk PUSPAGA ini?**

Faktor ekonomi dari keluarga yang memiliki ketahanan ekonomi, biasanya kita mengadakan pelatihan pembuatan batik. Terus kita meningkatkan UP2K “Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga” di kecamatan, selain itu kita juga ada Persatuan usaha mikro.

### **Apakah ada hubungannya antara ketahanan ekonomi dengan ketahanan keluarga**

Ketahanan ekonomi sangat penting untuk menjaga ketahanan keluarga.

Salah satu penyebab orang tua tidak melakukan pengasuhan yang baik atau melakukan kekerasan terhadap anak adalah faktor kemiskinan, bagaimana orang tua mau melakukan pengasuhan yang baik kalau harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan berjaruhan dengan anak. Untuk itu Kecamatan Rajeg sering mengadakan bazar di lapangan kecamatan yang diikuti oleh ibu-ibu yang memiliki usaha untuk menjual produknya untuk meningkatkan taraf hidup sehingga ekonomi juga meningkat dan dapat mengasuh anak dengan tenang

### **Kalau faktor politiknya bagaimana pak?**

Dari pemangku kepentingan kita dari lintas sektor seperti koramil, kepolisian selalu bersinergitas. Seperti kemarin di Ranca Bango ada keluarga belum mendapatkan bantuan kita langsung kroscek. Pemerintah desa juga sinergi dengan kita terutama pencegahan dan penanganan kasus stunting di desa.

Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ini masih menjadi fokus kita, kita ada kegiatan Kecamatan Layak Anak. Kami membina beberapa kelompok usia sebaya, melakukan sosialisasi kesehatan reproduksi, Kecamatan Rajeg sudah mendeklarasikan diri menjadi kecamatan layak anak, tahun 2020 kita mendapatkan juara 2 tingkat kabupaten. PUSPAGA merupakan bagian dari kebijakan Kota Layak Anak, dan merupakan persyaratan yang harus ada, Kebijakan Puspaga di dukung dari berbagai sektor, bahkan ada Puspaga yang dilaksanakan secara mandiri.

### **Forum anak apakah aktif pak?**

Aktif terutama Musrenbang, ada Musrenbang forum anak. Jadi dari Musrenbang forum anak kemudian disampaikan ke Musrenbang kecamatan. Jadi tidak bisa dari kita, wajib dari mereka/ anak-anak.



**Informan 5**

**HASIL WAWANCANA**  
**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUSPAGA DI KABUPATEN TANGERANG**

**Nama Informan** : **AKP Nurjaman, SH**  
**Jabatan** : **KANIT Bimbingan Masyarakat**  
**Intansi** : **KAPOLSEK RAJEQ KABUPATEN TANGERANG**  
**Tanggal Wawancara** : **7 November 2022**

=====

**Dalam satu tahun ada berapa kasus Pak?**

Kasus kekerasan terhadap anak untuk tahun 2022 yang dalam proses penyidikan dan sudah rampung ada 2 kasus. 1 sudah masuk persidangan dan vonis, sedangkan 1 lagi dalam proses penyidikan.

Kasus yang pertama kekerasan terhadap anak dengan korban anak, korban dianiya dengan pelaku yang saat ini masuk kategori dewasa. Sedangkan yang sudah vonis korban dan pelaku ini masih kategori anak.

Terkait dengan kasus anak memang relatif sedikit.

**Bagaimana yang diluar laporan?**

Sejauh ini cukup kondusif hanya akhir-akhir ini kita sedang direpotkan dengan tawuran pelajar, namun di wilayah kami hingga saat ini tidak ada. Namun itu sedang booming dimana mana, seperti geng motor yang didominasi oleh usia anak SMP atau SMA

**Bagaimana Pencegahan?**

Kami sedang menggalakan deklarasi oleh kanit bimas ke sekolah – sekolah, deklarasi anti tawuran, narkoba dan kenakalan remaja dengan melibatkan pelajar, sekolah dan orang tua. Kemudian kami juga melakukan pembinaan penyuluhan, kami melakukan penyuluhan SMP, SMA, dan SMK Sederajat. Ada yang kami lakukan di lapangan ataupun di dalam ruangan ketika menjadi inspektur upacara.

Kedepannya, karena ini lingkungan anak bukan hanya di lingkungan sekolah, kami juga akan turun ke lingkungan tempat tinggal bersama dengan perangkat desa. Apakah nanti melalui karang taruna atau sie kerohanian di masjid. Karena anak ini selain ada di lingkungan sekolah ada juga di lingkungan tempat tinggal.

**Bagaimana agar kekerasan anak dilingkungan rumah tidak terjadi?**

Selain agar tidak menjadi pelaku atau korban dengan memberikan aparaturnya lingkungan setempat dan orang tua. Anak ini punya 2 objek sebagai pelaku dan sebagai korban, agar anak terhindar dari keduanya.

**Baru saja kami ke Puspaga Rajeg Al-Inayah, kalau menurut bapak bagaimana dengan adanya lembaga tersebut?**

Mendukung kalau ada Lembaga yang memberikan bantuan konsultasi untuk pengasuhan anak, sehingga anak bisa diarahkan dan dinasehati untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan hal itu bisa membantu para orang tua untuk pencegahan secara dini, sekaligus membantu kami ketika ada permasalahan terkait anak bisa kami sarankan orang tua untuk melakukan konseling kepada PUSPAGA.

**Karena ini belum berjejaring, sarannya bagaimana pak kepada Puspaga?**

Kami bisa berkolaborasi dengan membuat MoU terkait penanganan anak, harapan kami bisa memiliki legalitas untuk menjadi saksi ahli. Karena kalau hanya P2TP2A untuk satu wilayah ini kan sangata terbatas.

**Saat ini sudah bekerjasama dengan P2TP2A?**

Sudah bekerjasama dengan P2TP2A terkait anak sebagai pelaku maupun korban.

Harapan kami supaya pencegahan agar tidak menjadi korban dan tidak menjadi pelaku dengan membuat standart perilaku mental anak agar orang tua mudah untuk mengarahkan.





## Informan 6

### HASIL WAWANCANA DENGAN PENERIMA MANFAAT IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUSPAGA DI KABUPATEN TANGERANG

Nama Informan : IBU LASTRI  
Jabatan : Penerima Manfaat  
Intansi : Puspaga Al Inayah Tangerang  
Tanggal Wawancara : 7 November 2022

---

#### IBU LASTRI

##### **Apa saja yang dikonsultasikan?**

Tadinya anak saya terlalu aktif, bergaul sama temennya susah. Usianya sekarang 12 tahun, emosinya tidak terkontrol sejak kecil.

##### **Siapa yang menerima?**

Saat mendaftar yang menerima bu etty, yang menyelesaikan dari konsultan yang datang.

##### **Sekarang anaknya sudah sembuh Bu?**

Berkurang tapi masih ada sih emosinya sedikit.

##### **Sudah berapa kali konsultasi?**

Baru sekali, tetapi itu pas dibawa anaknya, sering tidak mau

##### **Bagaimana kemampuan psikolog menangani kasus?**

Sudah cukup bagus penangannya, karena anak saya yang tadinya pemarah sekarang sudah berkurang, diberikan pendampingan dan bantuan dalam mengelola dan mengatasi emosinya. Saya disuruh memberikan perhatian dan dukungan kepada anak. Mendengarkan keluhan atau curahan hati anak tentang masalah yang dihadapinya, membantu anak untuk mengekspresikan emosinya dengan cara yang sehat dan konstruktif. Memberikan pujian atau penghargaan ketika anak berhasil mengatasi masalah emosionalnya dengan baik serta disuruh berbicara dengan anak tentang cara mengungkapkan emosi dengan kalimat yang

sopan dan santun, serta menghindari tindakan yang merugikan diri sendiri atau orang lain.

### **Apakah keberadaan Puspaga ini dibutuhkan?**

Sangat dibutuhkan, kalau ada masalah bisa konsultasi.

### **Saran untuk perbaikan PUSPAGA?**

Sudah cukup bagus Bu. Kendalanya ketika covid19, karena tidak bisa langsung ketemu jadi kurang maksimal. Jadinya malah jarang yang konsultasi karena covid, saran saya memberi tahu ke pihak yang akan berkonsultasi. Kadang-kadang orang yang akan konsultasi malu, sering dikasih tau sama bu etty kalau mau konsul ini bisa, sudah baik komunikasinya.

### **Apakah Bu Lastris mendukung Kebijakan adanya PUSPAGA?**

Mendukung sekali karena bisa konsultasi dengan Psikolog, dan sudah merasakan manfaatnya, karena mendapat bimbingan dari psikolog sehingga masalah pengasuhan anak tertangani, dukungannya menginformasikan ke tetangga sekitar ke pengajian atau arisan,



**Informan 7**

**HASIL WAWANCANA  
DENGAN PENERIMA MANFAAT  
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUSPAGA DI KABUPATEN TANGERANG**

**Nama Informan** : Ibu Riri  
**Jabatan** : Penerima Manfaat  
**Intansi** : Puspaga Al Inayah Tangerang  
**Tanggal Wawancara** : 7 November 2022

=====

**Pernah konsultasi terkait apa Bu?**

Anak, menyalahkan cara asuh orang tua. Kayaknya kurang puas dari kecil diasuhnya terlalu keras sama bapaknya, dampaknya pas sekarang udah dewasa. Jadi anak ini tidak mau bergaul, jadi susah membina hubungan dengan sekitar, dia sudah berusia 30 tahun dan ketika konsultasi usia 28 tahun.

Tidak pernah memukul tapi hanya dari omongannya itu.

**Ibu ketemu konsultan tidak?**

Tidak, karena anak saya kerja jadi saya yang mewakili. Cuma anak saya itu tidak mau karena malu, karena sekarang lagi ngobrol dia sering bicara kalau ini gara-gara ayah.

**Bagaimana kemampuan psikolog menangani kasus anak Ibu?**

Sudah bagus pendampingannya dan nasehat ke saya, anak saya selalu menyalahkan bapaknya kalau dia sedang marah, cuma anaknya tidak mau di ajak konsultasi atau tetapi karena sudah besar sudah 30 tahun, bapaknya mendidik terlalu keras, sehingga atas nasehat psikolog untuk berbicara dengan anak tersebut secara terbuka dan jujur tentang kekhawatiran terhadap perilakunya. Berbicara dengan cara yang positif dan ramah, dan dengarkan apa yang ia katakan tentang kekhawatirannya, seharusnya mendapat terapi tapi anaknya tidak mau karena sudah besar.

**Bagaimana menurut ibu tentang keberadaan PUSPAGA? Sudah berapa kali konsultasi?**

Sangat membantu, baru sekali namun sudah agak legaan. Tapi mba Nurul itu pengen ketemu anaknya tetapi anaknya tidak mau datang

**Saran ibu bagaimana untuk PUSPAGA?**

Harus dipertahankan karena sangat membantu.

**Apakah Bu Riri Dukungan terhadap Kebijakan adanya PUSPAGA ?**

Mendukung sekali karena bisa konsultasi dengan Psikolog, dan sudah merasakan manfaatnya, karena mendapat bimbingan dari psikolog sehingga masalah pengasuhan anak tertangani, dukungannya menginformasikan ke tetangga sekitar dan diinfokan ke pengajian atau arisan



**Informan 8**

**HASIL WAWANCANA  
DENGAN PENERIMA MANFAAT  
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUSPAGA DI KABUPATEN TANGERANG**

**Nama Informan** : Ibu Dwi  
**Jabatan** : Penerima Manfaat  
**Intansi** : Puspaga Al Inayah Tangerang  
**Tanggal Wawancara** : 7 November 2022

=====

**Apakah sudah konsultasi ke Puspaga Bu? Tentang apa?**

Tentang anak, saya punya anak perempuan kebetulan anak sambung dari kelas 2 sudah saya asuh. Semenjak SMP kelas 2 karena libur sekolah panjang sekali saat covid, karena kenal HP, jadi akhirnya anak ini sering ngurung diri dikamar. Saran PUSPAGA harus seringkali diajak bicara, paling kalau ada masalah di sekolah dia sering banget cerita sama aku. Tetapi kalau dipanggil anaknya mau keluar

**Keberadaan Puspaga ini bagaimana bu?**

Konselingnya ditambah, personel konselornya juga ditambah serta waktu konsultasinya juga.

**Anaknya dibawa kesini mau tidak Bu?**

Tidak mau, karena anaknya sekolah

**Apakah sudah ada perubahan Bu setelah konsultasi?**

Sudah ada Bu, anaknya sekarang sudah mulai mau berbaur

**Apakah Bu Dwi mendukung Kebijakan adanya PUSPAGA?**

Mendukung sekali karena bisa konsultasi dengan Psikolog, dan sudah merasakan manfaatnya, kemudian mendapat bimbingan dari psikolog sehingga masalah pengasuhan anak tertangani, dukungannya menginformasikan ke tetangga sekitar atau melalui pengajian dan ketika mengantar anak ke sekolah.



# **LAMPIRAN SURAT-SURAT**



**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA**

**DEPUTI BIDANG PEMENUHAN HAK ANAK**

JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NOMOR 15, JAKARTA 10110  
TELEPON (021) 3842638,3805563, FAKSIMILE (021) 3805562, 3805559  
SITUS : www.kemenpppa.go.id

**SURAT KETERANGAN**

**Nomor : SK - 01 /DEP.PHA/KPP-PA/ SESDEP/5/2023**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Dra. Maydian Werdiastuti, M.Si.
2. NIP. : NIP. 196305091988112001
3. Pangkat / golongan ruang : Pembina Utama Muda / IV/d
4. Jabatan : Sekretaris Deputi
5. Unit Kerja : Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak

Dengan ini menerangkan bahwa Pegawai Negeri Sipil dibawah ini :

1. Nama : Nurul Khakhimah
2. Jabatan : Analis keuangan Ahli Madya
3. Unit Kerja : Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak

Adalah pegawai pada Sekretaris Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak yang saat ini sedang melakukan izin belajar di Program Adminitrasi Pembangunan Negara, Politeknik STIA LAN Jakarta.

Sebagai prasyarat sidang tesis yang bersangkutan dinyatakan telah melakukan penelitian pada tanggal 1 November s.d 20 Februari 2023 di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak khususnya di Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak.

Demikian Surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 24 Mei 2023  
Sekretaris Deputi Bidang PHA



Dra. Maydian Werdiastuti, M.Si.  
NIP. 196305091988112001

Nomor : 1933/STIA.1.1/PPS.02.3 Jakarta, 1 November 2022  
Sifat : Biasa  
Lampiran : Proposal Penelitian Tesis.  
Hal : Permohonan Ijin Penelitian Mahasiswa  
Program Magister Terapan  
Politeknik STIA LAN Jakarta

**Yth. Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak Atas  
Pengasuhan dan Lingkungan**

Jl. Merdeka Barat 15, Jakarta Pusat

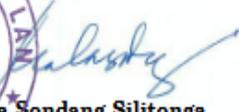
Bersama ini dengan hormat kami informasikan, bahwa salah satu mahasiswa kami :

Nama : Nurul Khakhimah  
NPM : 2041021021  
Jurusan : Administrasi Publik  
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara  
Konsentrasi : Kebijakan Pembangunan  
Judul Tesis : Implementasi Kebijakan PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga) di Kabupaten Tangerang

akan melakukan penelitian dalam rangka penulisan tesis di Instansi Bapak/Ibu.

Sehubungan dengan itu, kami mohon perkenan Bapak/Ibu untuk memberikan ijin dan membantu mahasiswa tersebut mendapatkan bahan-bahan/data/informasi yang dibutuhkan.

Atas perkenan, bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

An. Direktur  
Wakil Direktur I Bidang Akademik,  
  
M. Silitonga



Tembusan :  
1. Direktur;  
2. Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak;  
3. KAJUR Administrasi Publik;  
4. Kaprodi Program Magister Terapan.

Nomor : 1933/STIA.1.1/PPS.02.3 Jakarta, 1 November 2022  
Sifat : Biasa  
Lampiran : Proposal Penelitian Tesis.  
Hal : Permohonan Ijin Penelitian Mahasiswa  
Program Magister Terapan  
Politeknik STIA LAN Jakarta

**Yth. Camat Kecamatan Rajeg**  
di  
Tangerang

Bersama ini dengan hormat kami informasikan, bahwa salah satu mahasiswa kami :

Nama : Nurul Khakhimah  
NPM : 2041021021  
Jurusan : Administrasi Publik  
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara  
Konsentrasi : Kebijakan Pembangunan  
Judul Tesis : Implementasi Kebijakan PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga) di Kabupaten Tangerang

akan melakukan penelitian dalam rangka penulisan tesis di Instansi Bapak/Ibu.

Sehubungan dengan itu, kami mohon perkenan Bapak/Ibu untuk memberikan ijin dan membantu mahasiswa tersebut mendapatkan bahan-bahan/data/informasi yang dibutuhkan.

Atas perkenan, bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

An. Direktur  
Wakil Direktur I Bidang Akademik,  
  
Mala Sondang Silitonga



Tembusan :  
1. Direktur;  
2. Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak;  
3. Kajor Administrasi Publik;  
4. Kaprodi Program Magister Terapan.

Nomor : 1933/STIA.1.1/PPS.02.3 Jakarta, 1 November 2022  
Sifat : Biasa  
Lampiran : Proposal Penelitian Tesis.  
Hal : Permohonan Ijin Penelitian Mahasiswa  
Program Magister Terapan  
Politeknik STIA LAN Jakarta

**Yth. Kapolsek Kecamatan Rajeg**  
di  
Tangerang

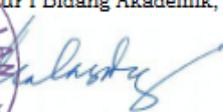
Bersama ini dengan hormat kami informasikan, bahwa salah satu mahasiswa kami :

Nama : Nurul Khakhimah  
NPM : 2041021021  
Jurusan : Administrasi Publik  
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara  
Konsentrasi : Kebijakan Pembangunan  
Judul Tesis : Implementasi Kebijakan PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga) di Kabupaten Tangerang

akan melakukan penelitian dalam rangka penulisan tesis di Instansi Bapak/Ibu.

Sehubungan dengan itu, kami mohon perkenan Bapak/Ibu untuk memberikan ijin dan membantu mahasiswa tersebut mendapatkan bahan-bahan/data/informasi yang dibutuhkan.

Atas perkenan, bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

An. Direktur  
Wakil Direktur I Bidang Akademik,  
  
Mala Sondang Silitonga



Tembusan :  
1. Direktur;  
2. Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak;  
3. KAJUR Administrasi Publik;  
4. Kaprodi Program Magister Terapan.

Nomor : 1933/STIA.1.1/PPS.02.3 Jakarta, 1 November 2022  
Sifat : Biasa  
Lampiran : Proposal Penelitian Tesis.  
Hal : Permohonan Ijin Penelitian Mahasiswa  
Program Magister Terapan  
Politeknik STIA LAN Jakarta

**Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang**

Komplek Perkantoran Tiga Raksa, Jl. KH. Sarbini no 2  
lantai 2, Tangerang

Bersama ini dengan hormat kami informasikan, bahwa salah satu mahasiswa kami :

Nama : Nurul Khakhimah  
NPM : 2041021021  
Jurusan : Administrasi Publik  
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara  
Konsentrasi : Kebijakan Pembangunan  
Judul Tesis : Implementasi Kebijakan PUSPAGA (Pusat Pembelajaran  
Keluarga) di Kabupaten Tangerang

akan melakukan penelitian dalam rangka penulisan tesis di Instansi Bapak/Ibu.

Sehubungan dengan itu, kami mohon perkenan Bapak/Ibu untuk memberikan ijin dan membantu mahasiswa tersebut mendapatkan bahan-bahan/data/informasi yang dibutuhkan.

Atas perkenan, bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

An. Direktur  
Wakil Direktur I Bidang Akademik,  
  
M. Silitonga



Tembusan :  
1. Direktur;  
2. Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak;  
3. Kajur Administrasi Publik;  
4. Kaprodi Program Magister Terapan.

## DAFTAR RIYAWAT HIDUP

Nama : Nurul Khakhimah

Tempat dan Tanggal Lahir : Jakarta, 4 Oktober 1972

Alamat Rumah : Komplek Sekneg Bloc CI Nomor 23  
Kelurahan Panunggangan Utara  
Kecamatan Pinang Kota Tangerang

Nomor Telepon Genggam : 081210035871

Email/Surel : nuruljakvaroni@gmail.com

Status perkawinan : Menikah 2 anak

Nama instansi : Kementerian Pemberdayaan  
Perempuan dan Perlindungan Anak

Alamat instansi : JL. Merdeka Barat 15 Jakarta Pusat

Nomor telepon : 021 - 3805563

Pangkat dan Golongan : IV/a - Pembina

Riwayat Pendidikan : SD Negeri I Giyanti Temanggung  
SMP Negeri 4 Temanggung  
SMEA Negeri 1 Temanggung  
SI STIA LAN JAKARTA  
S2 STIA LAN JAKARTA

Riwayat Pekerjaan : Kasubag Perpustakaan  
Kasubag Perlengkapan  
Kepala Bidang Perlindungan Khusus Anak  
JF ABPN AHLI MADYA  
Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja  
Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak